

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Eksandy, A (2017) yaitu dengan tujuan penelitian ini menganalisis Indeks ISR melalui laporan tahunan bank dengan menggunakan metode analisis isi. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan program Eviews 9.0. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa akuntabilitas dan transparansi mampu memoderasi hubungan *leverage* dengan pengungkapan ISR. *Leverage* tidak berpengaruh pada pengungkapan ISR, tetapi setelah dimoderasi oleh akuntabilitas dan transparansi, *leverage* memiliki efek negatif pada pengungkapan ISR. Penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan pada penelitian ini, yaitu pada variabel independen yang digunakan, penelitian ini memiliki tiga variabel sedangkan penelitian terdahulu diatas hanya satu. Untuk variabel moderating, peneliti hanya menggunakan satu yaitu akuntabilitas sementara penelitian terdahulu menggunakan akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian oleh Sabrina & Betri (2018) dengan tujuannya untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan analisis teknik yang digunakan yaitu analisis linear berganda dan analisis regresi moderat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan *leverage* bersama tentang pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hanya profitabilitas awal yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR secara signifikan. Variabel ukuran perusahaan yang cukup dimoderasi bisa memperkuat hubungan antara profitabilitas dan *leverage* pada pengungkapan ISR dengan moderasi murni. Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu adalah pada variabel-variabel

yang digunakan, dimana penelitian ini mengambil variabel profitabilitas, pendayaagunaan aset, dan *leverage* serta adanya variabel moderating akuntabilitas, sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan profitabilitas dan *leverage*. Variabel moderasi penelitian ini adalah akuntabilitas, sedangkan penelitian diatas tersebut adalah ukuran perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian pun berbeda sebab penelitian ini menggunakan data perusahaan-perusahaan yang terdaftar di ISSI pada tahun 2016-2018 sedangkan penelitian sebelumnya yaitu data perusahaan yang terdaftar dalam JII pada tahun 2013-2017.

Penelitian oleh Alfianita, W, dkk (2018) memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dan mendapatkan hasil yaitu tiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ISR dan pengungkapan parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sementara profitabilitas dan kinerja lingkungan tidak mempengaruhi pengungkapan ISR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut yaitu periode data yang digunakan, penelitian ini akan menggunakan data periode 2016-2018 sedangkan penelitian terdahulu yaitu 2013-2014.

Penelitian dari Karomah, U. Dkk (2018) menggunakan metode pengambilan sampel yaitu metode *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, sekuritas saham dan leverage. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR perusahaan yang terdaftar di ISSI. Adapun profitabilitas, jenis industri, sekuritas Islam dan leverage tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR perusahaan yang terdaftar di ISSI.

Penelitian oleh Susanti, E. & Puji Nurhayati (2018) dengan metode *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive*

sampling. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi berganda. Penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ISR di Indonesia. Sedangkan tipe industri dan surat berharga berpengaruh secara signifikan terhadap ISR di Indonesia.

Penelitian dari Nugraheni, P & Ristina W. (2017) menggunakan *purposive sampling* untuk mengambil perusahaan yang akan diteliti, teknik analisis menggunakan regresi berganda. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perusahaan yang sesuai syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES). Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada pengungkapan ISR, sementara profitabilitas, tipe industri dan kepemilikan surat berharga syariah tidak berpengaruh pada pengungkapan ISR di perusahaan yang terdaftar di DES Indonesia. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu pada variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, pendayagunaan aset, dan *leverage* sedangkan penelitian sebelumnya ada ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan kepemilikan surat berharga syariah. Selain itu, data perusahaan yang digunakan juga berbeda. Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar pada ISSI.

Penelitian Widagdo, B. & Novita Satiti (2018) dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan umur usaha dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran dan usia perusahaan secara bersamaan telah membawa efek positif yang signifikan terhadap pengungkapan ISR, sementara profitabilitas tidak berkontribusi efek signifikan terhadap pengungkapan ISR Bank Islam yang ada di Indonesia. Lalu, ukuran dan usia perusahaan memberikan efek signifikan terhadap penilaian perusahaan, sementara

profitabilitas dan pengungkapan ISR tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penilaian perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu pada data yang digunakan, penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar di ISSI sedangkan penelitian terdahulu hanya pada Bank Islam yang ada Indonesia. Variabel yang digunakan juga berbeda, penelitian ini hanya menggunakan satu variabel dependen yaitu pengungkapan ISR sementara penelitian terdahulu menggunakan dua variabel dependen, pengungkapan ISR dan penilaian perusahaan.

Mais, R. G. & Engkur (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh jenis industri, *Return on Asset*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Metode penelitian menggunakan regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa jenis industri dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada ISR. Perusahaan baik dalam kelompok industri profil tinggi dan profil rendah melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sama dalam syariah. Juga, kepemilikan institusi besar dan kecil masih akan dilakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. *Return On Asset* dan ukuran perusahaan mempengaruhi ISR. Artinya, ketika lebih tinggi profitabilitas dan ukuran perusahaan akan mendorong pengungkapan ISR lebih efektif. Penelitian ini memiliki dampak dalam menginformasikan dan meningkatkan pemahaman investor Muslim yang memiliki saham di JII. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang terdahulu diatas, yaitu pada variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, pendayagunaan aset, dan *leverage* serta adanya variabel moderating akuntabilitas sementara penelitian terdahulu tidak ada variabel moderating dan variabel independennya adalah jenis industri, ROA, ukuran perusahaan, dan kelembagaan kepemilikan.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

2.2.1.1. Pengungkapan (*Disclosure*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengungkapan adalah turunan dari kata dari “ungkap” yang artinya membuka, melingkap. Pengungkapan berarti proses, cara, perbuatan mengungkapkan.

Dalam akuntansi pengungkapan terarah dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebuah perusahaan. Informasi yang diberikan laporan keuangan adalah informasi yang berisi tentang laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan serta laporan yang terkait dengan laporan keuangan tersebut. Ada tiga konsep yang tidak terlepas dari pengungkapan (*disclosure*) yaitu (1) untuk siapa informasi diungkap, (2) apa tujuan informasi tersebut dan (3) berapa banyak informasi diungkap. Standar pengungkapan tersebut yang menentukan apakah informasi yang telah diungkapkan sudah cukup atau masih ada yang kurang. (Ibid, (dalam Anggraeni 2017)

Pengungkapan dalam laporan keuangan terbagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan.

2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan selain yang telah diwajibkan oleh standar atau badan pengawas.

Setiap perusahaan harus melakukan pengungkapan sesuai dengan konsep pengungkapan itu yaitu cukup, wajar, dan lengkap sehingga mengarah pada *full disclosure*. (Apriyanti, hal.88)

2.2.1.2. *Islam Social Reporting (ISR)*

Di dalam Islam, setiap individu akan di minta pertanggung jawaban baik dia seorang muslim ataupun nonmuslim. Setiap manusia akan diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatan maupun keputusan

yang diambilnya, terlebih lagi jika perbuatan atau keputusan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk bagi dirinya sendiri atau masyarakat luas. Jika perbuatan atau keputusan yang diambil bisa memberikan dampak negatif untuk dirinya sendiri sudah sangat diperhatikan dalam Islam, maka sudah pasti setiap tindakan dan keputusan yang berdampak kepada publik atau kelompok tertentu akan mendapat perhatian yang besar dalam agama Islam. Bentuk perhatian tersebut tertuang dalam berbagai aturan dalam Islam baik yang tercantum dalam Al-Quran atau Hadits Nabi Muhammad SAW. Salah satu dalil yang menyebutkan bentuk perhatian Islam dalam hal ini ialah tertuang dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang Artinya; *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula* (QS. Az Zalzalah [99] : 7-8). (Rohmah, 2018)

Dari ayat yang dijelaskan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa semua yang dilakukan manusia akan mendapatkan balasannya kelak. Setiap kegiatan perusahaan pun akan dipertanggungjawabkan apakah itu baik bagi lingkungan sekitar atau malah menimbulkan kerugian bagi sekitar. Dengan adanya ISR maka dapat menggambarkan tanggung jawab perusahaan apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum serta apa yang masih harus diperbaiki dalam menjalankan usaha tersebut.

Dengan adanya konsep tanggung jawab sosial dalam Islam maka banyak perusahaan yang berkeinginan untuk membuat pengungkapan sosial yang bersifat syariah. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) telah mengeluarkan standar mengenai kerangka dasar dan laporan keuangan syariah, akan tetapi standar itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu standar dalam pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah dikarenakan belum menyebutkan keseluruhan item terkait pelaporan tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Salah satu cara untuk menilai

pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah yaitu dengan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR). (Andaru, 2015)

Islamic Social Reporting (ISR) sendiri merupakan perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan yang dimiliki masyarakat yang tidak hanya mengenai peran perusahaan terhadap perekonomian, tetapi juga peran perusahaan terhadap perspektif spiritual (Haniffa, (2002:132 dalam Asriati, 2016).

Indeks ISR menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan. Dengan demikian sesuai rancangan Othman et al. (2009) (dalam Andaru, 2015) berikut adalah enam tema pengungkapan dalam kerangka ISR yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pendanaan dan Investasi

- a. Riba. Dalam Q.S. Al-Baqarah: 275 yang artinya *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”*

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa riba adalah haram maka setiap pelaku usaha harus bisa menjalankan kegiatan usahanya dengan menjauhi riba.

- b. Gharar. Gharar merupakan ketidakpastian yang terjadi akibat ketidaksempurnaan informasi dalam lima hal, yaitu informasi dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad.
- c. Zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap umat Muslim atas kepemilikan harta benda ketika telah mencapai nisab, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk mendirikan shalat dan

menunaikan zakat (Q.S. Al-Baqarah: 43). Dalam hal hal ketaan kepada Allah SWT tersebut, maka setiap perusahaan yang berlandaskan syariah seharusnya mengeluarkan zakat dan mengungkapkan praktik tersebut.

- d. Kebijakan atas keterlambatan pembayaran utang. Penangguhan utang dapat sebelumnya dilakukan penyelidikan kepada pihak debitur, jika telah mengetahui kesulitan apa yang terjadi maka penangguhan atau penghapusan itu dilakukan berdasarkan rasa kemanusiaan dan saling tolong-menolong antar manusia.
- e. *Value added statement*. *Value added statement* merupakan pernyataan yang melaporkan perhitungan nilai tambah serta aplikasinya di antara para pemangku kepentingan perusahaan. Untuk penelitian ini *value added statement* mengikuti pernyataan nilai tambah yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

2. Produk dan Jasa

- a. Produk yang ramah lingkungan. Dalam Surah Al-A'raf:56, Allah SWT melarang makhluknya melakukan kerusakan di muka bumi. Maka bagi perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang baik adalah suatu yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunannya.
- b. Status kehalalan produk. Identifikasi halal haram suatu produk haruslah diungkapkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari, sehingga para pemangku kepentingan pun dapat merasa aman karena perusahaan tersebut menghasilkan laba dari produk yang memang halal untuk diproduksi dan dipasarkan.
- c. Kualitas dan keamanan produk. Setiap produk yang berkualitas dan aman pasti akan mendapat respon positif bagi para pelanggan, serta penjualan atas produk tersebut akan menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan.
- d. Pelayanan pelanggan. Pelanggan akan mengulai untuk membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa itu karena merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

3. Karyawan

Kesejahteraan bagi para karyawan dalam suatu perusahaan pun harus diperhatikan. Jika karyawan merasa aman dan sejahtera maka usaha yang dijalankan akan lebih bermanfaat sekitar. Kesejahteraan karyawan ini contohnya dalam hal gaji, bonus, waktu kerja yang sesuai, tunjangan serta berbagai kebaikan yang diberikan perusahaan harus diungkapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kesejahteraan dan kemakmuran para karyawan yang ada di dalam lingkup perusahaan.

4. Masyarakat

Islam sangat menjunjung tinggi kebutuhan masyarakat di atas kebutuhan individu. Saling berbagi terhadap sesama memang sangat dianjurkan. Dalam hal ini perusahaan berbagi kepada masyarakat sekitar adalah bentuk tanggung jawab perusahaan karena telah diberikan kesempatan untuk menjalankan operasional perusahaan dengan baik di wilayah masyarakat tersebut. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat contohnya seperti sumbangan dalam acara masyarakat, bantuan saat terjadi bencana, beasiswa pendidikan, lapangan pekerjaan dan kegiatan sosial di lingkungan sekitar akan membuat masyarakat merasa senang dan nyaman. Setiap kegiatan perusahaan terhadap masyarakat tersebut pun harusnya diungkapkan untuk para pemangku kepentingan.

5. Lingkungan

Dalam Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi serta isinya. Perusahaan yang menggunakan alam sebagai sumber bahan baku dalam usahanya pun harus sesuai sehingga tidak dipergunakan dengan berlebih dan lingkungan pun tetap terjaga keasriannya.

6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Menurut Kasri (2009), perbedaan utama tata kelola perusahaan dalam sistem Islam dan sistem konvensional terletak pada aspek filosofi yang mencakup tujuan perusahaan, jenis keterlibatan kontrak,

tokoh kunci dalam praktik tata kelola perusahaan, serta hubungan di antara para pemain kunci tersebut. Dalam perspektif Islam, praktik tata kelola perusahaan merupakan salah satu bentuk kewajiban umat Muslim terhadap Allah SWT sehingga tercipta kontrak “implisit” antara manusia dengan Allah SWT dan kontrak “eksplisit” antara manusia dengan sesama manusia. Berdasarkan pembahasan dan penyesuaian di atas, kriteria-kriteria pengungkapan tema tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah status kepatuhan terhadap syariah, struktur kepemilikan saham, profil Dewan Direksi, pengungkapan ada atau tidaknya praktik monopoli usaha, pengungkapan ada atau tidaknya praktik menimbun bahan kebutuhan pokok, pengungkapan ada atau tidaknya praktik manipulasi harga, pengungkapan ada atau tidaknya perkara hukum, dan kebijakan anti korupsi.

Berdasarkan dari teori pengungkapan dan ISR yang telah dijelaskan diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa pengungkapan ISR adalah proses penyampaian atau pelaporan perusahaan yang berlandaskan kepada kategori-kategori ISR yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan selaku pelaku bisnis kepada Allah SWT dan juga pertanggungjawaban pelaku bisnis kepada sesama manusia.

Indeks pengukuran dalam penelitian ini terdiri dari 46 item pengungkapan sesuai dengan materi yang telah dijabarkan dengan berdasarkan rancangan Othman et al. (2009) (dalam Andaru, 2015). Masing-masing item bernilai 1 atau 0. Nilai 1 apabila item dalam ISR terdapat dalam laporan tahunan perusahaan dan nilai 0 apabila sebaliknya. Nilai dijumlahkan sesuai tema sehingga akan terlihat dari tema mana yang lebih menjadi pusat perhatian dari masing-masing perusahaan. Nilai keseluruhan tema akan diperhitungkan sebagai indeks ISR dengan nilai terbesar 46 dan terkecil 0 untuk setiap perusahaan pertahunnya. Dengan rumus :

$$\text{ISR} = \frac{\text{Jumlah skor ISR yang terpenuhi}}{\text{Jumlah skor maksimum}}$$

Berikut adalah 46 item yang ada dalam indeks *Islamic Social Reporting* :

Tabel 2.1 : Item *Islamic Social Reporting*

A	Tema pembiayaan dan investasi
1	Kegiatan yang mengandung riba
2	Pengungkapan kegiatan yang mengandung gharar atau tidak (memastikan adanya ketidakpastian, yang dilarang dalam Islam)
3	Zakat
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih
5	Pernyataan nilai tambah perusahaan
B	Tema produk dan jasa
6	Produk atau kegiatan operasi yang ramah lingkungan
7	Kehalalan produk
8	Keamanan dan kualitas produk
9	Pelayanan pelanggan
C	Tema karyawan
10	Jam atau waktu kerja
11	Hari libur dan cuti
12	Tunjangan
13	Remunerasi
14	Pendidikan dan pelatihan karyawan
15	Kesempatan yang sama atau kesetaraan gender
16	Keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen dan pengambilan keputusan
17	Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan B4
18	Lingkungan atau suasana kerja
19	Karyawan dari kelompok khusus (cacat fisik, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba)
20	Karyawan tingkat atas melaksanakan ibadah bersama-sama dengan karyawan tingkat menengah dan tingkat bawah
21	Karyawan Muslim diperbolehkan menjalankan ibadah di waktu-waktu shalat dan berpuasa di saat Ramadhan
22	Tempat ibadah yang memadai
D	Tema masyarakat
23	Sedekah, donasi, atau sumbangan
24	Wakaf
25	Qard Hassan (peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan

	apapun kecuali pinjaman, sifat nya tidak memberi keuntungan finansial)
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan
27	Pemberian beasiswa
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)
29	Pengembangan generasi muda
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu
31	Kepedulian terhadap anak-anak
32	Kegiatan amal atau kegiatan sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastuktur, dan lain-lain)
33	Mensponsori acara kesehatan masyarakat, proyek rekreasi, olahraga, dan acara budaya
E	Tema Lingkungan
34	Konservasi lingkungan
35	Kegiatan mengurangi efek terhadap pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih)
36	Pendidikan mengenai lingkungan
37	Pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan
38	Sistem manajemen lingkungan
F	Tema Tatakelola Perusahaan
39	Status kepatuhan terhadap syariah
40	Struktur kepemilikan saham
41	Profil Dewan Direksi
42	Pengungkapan melakukan praktik monopoli usaha atau tidak
43	Pengungkapan melakukan praktik menimbun bahan kebutuhan pokok atau tidak
44	Pengungkapan melakukan praktik manipulasi harga atau tidak
45	Pengungkapan adanya perkara hukum atau tidak
46	Kebijakan anti korupsi

Sumber : Othman et al. (2009) (dalam Andaru, 2015)

2.2.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah istilah yang digunakan dalam menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya.

Akuntabilitas menurut para ahli, yaitu :

1. Menurut Mardiasmo

Akuntabilitas dibagi menjadi dua jenis, diantaranya :

- a. Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas yang berupa tanggung jawab seorang atasan dengan bawahannya.
- b. Akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas yang berupa tanggung jawab oleh orang ataupun lembaga yang setara.

2. Menurut Mahmudi

Akuntabilitas dalam lembaga publik dapat dibagi menjadi lima bagian, antara lain :

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas ini adalah pertanggungjawaban yang berkaitan antara aktivitas penegakan hukum dengan norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas ini adalah pertanggungjawaban yang terkait dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas ini adalah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan setiap program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus bisa menunjukkan jika program yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar program yang akan direncanakan dapat berjalan dengan optimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan ataupun diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan,

manfaat yang ditimbulkan, hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah diambil.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada negara. Lembaga publik harus bisa menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana saja uang tersebut dibelanjakan, dan bagaimana dengan pertanggungjawaban lainnya.

Akuntabilitas menjadi salah satu prinsip dalam Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Akuntabilitas ini dimaksudkan sebagai prinsip dalam mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam pengelolaan perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham. Agar akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen. Dewan komisaris harus bisa melaksanakan pertimbangan yang objektif tentang urusan perusahaan secara independen, khususnya terhadap manajemen. Perusahaan harus mendefinisikan fungsi, hak, tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing organ perusahaan serta mengomunikasikan hal-hal tersebut kepada setiap pihak yang berkepentingan. Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen haruslah jelas dari segi aspek akuntabilitasnya. Dan perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas antar organ perusahaan serta mengurangi adanya masalah karena perbedaan kepentingan antara manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Tiga tingkatan yang dimiliki akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas individual

Akuntabilitas individual terkait kepada hubungan akuntabilitas dalam konteks atasan-bawahan. Akuntabilitas berlaku kepada kedua belah

pihak, baik yang mempunyai wewenang dan yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang.

2. Akuntabilitas tim

Akuntabilitas ini terkait kepada adanya akuntabilitas yang ditanggung bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dari kinerja yang tercapai.

3. Akuntabilitas korporasi

Akuntabilitas korporasi ini terkait kepada akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai entitas bisnis. Dalam hal demikian ini perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukannya dalam berbisnis.

Menurut IAEI Indonesia (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) akuntabilitas harus mengacu sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk akuntabilitas yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan produk yang halal dan baik
2. Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat
3. Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam
4. Mencapai tujuan usaha bisnis
5. Menjadikan karyawan dan masyarakat baik
6. Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis
7. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah

Berdasarkan uraian akuntabilitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban setiap perusahaan terhadap lingkungan baik di dalam maupun di luar perusahaan serta sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh IAEI. Terdapat 7 item untuk akuntabilitas, masing-masing item pengungkapan memiliki nilai 1 atau 0, dimana nilai 1 akan diberikan apabila item terdapat dalam laporan tahunan perusahaan dan nilai 0 akan diberikan apabila item tidak terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlahkan, sehingga nilai terbesar adalah 7 dan nilai terkecil adalah 0. Setelah

pemberian nilai selesai dilakukan, maka besarnya tingkat akuntabilitas dan transparansi dapat ditentukan dengan rumus berikut :

$$\text{Akuntabilitas} = \text{Jumlah skor yang terpenuhi} / \text{jumlah skor maksimum}$$

Tabel 2.2 : Item Akuntabilitas

1	Menyediakan produk yang halal dan baik
2	Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat
3	Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam
4	Mencapai tujuan usaha bisnis
5	Menjadi karyawan dan masyarakat
6	Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis
7	Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah

Sumber : Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI Indonesia) (dalam Eksandy, 2017)

Berdasarkan pada Item Akuntabilitas tersebut ada item yang sudah tercantum dalam ISR sehingga dalam penelitian ini item tersebut tidak digunakan kembali, yaitu Item pertama menyediakan produk halal dan baik. Sehingga total skor maksimum dari akuntabilitas adalah 6.

2.2.3. Profitabilitas

2.2.3.1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah setiap kemampuan perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan dari bentuk kegiatan penjualan terkait operasional ataupun dalam hal pengelolaan aset terkait masa depan bagi perusahaan, sehingga profitabilitas dapat dijadikan bentuk tolak ukur bagi para investor maupun kreditor dalam penilaian kinerja suatu perusahaan, jadi dapat dikatakan semakin besar tingkat profitabilitas maka akan semakin baik kinerja perusahaan. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan profit, hal ini yang menjadi daya tarik bagi investor dalam

melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen harus dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Tingkat profitabilitas itu juga akan menggambarkan posisi laba perusahaan. (Tasya, 2018)

Menurut Haryanto (2019) profitabilitas adalah hasil akhir dari beberapa kebijakan dan keputusan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas dapat memberikan informasi yang berguna dalam menilai efektifitas dari operasional sebuah perusahaan, sehingga rasio profitabilitas akan menunjuk kombinasi dari efek likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil-hasil operasi. Profitabilitas akan menunjukkan keseimbangan pendapatan dan kemampuan perusahaan agar menghasilkan laba pada berbagai tingkat operasi, sehingga rasio ini akan mencerminkan efektifitas dan keberhasilan manajemen secara keseluruhan.

2.2.3.2. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang diperoleh dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :

1. Profit Margin (*Profit Margin on Sales*).

Profit Margin merupakan salah satu rasio yang digunakan dalam mengukur margin laba atas penjualan. Pengukuran rasio ini adalah dengan cara membanding antara laba bersih setelah pajak perusahaan dengan penjualan bersih yang didapat perusahaan.

2. *Return on Investment* (ROI)

Return on Investment (ROI) atau *Return on Total Assets* adalah rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran

yang menggambarkan efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

3. *Return on Equity* (ROE).

Return on Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal yang dimiliki. Rasio ini akan mencerminkan efisiensi penggunaan modal sendiri tersebut. Makin tinggi rasio ini, maka efisiensi perusahaan makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, dan demikian pula apabila terjadi sebaliknya.

4. Laba Per Lembar Saham.

Rasio Laba Per Lembar Saham (*Earnings Per Share*) adalah rasio untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan untuk para pemegang saham. Rasio yang didapat rendah menandakan bahwa manajemen belum berhasil untuk memuaskan para pemegang saham, begitupun sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka perusahaan akan memberikan kesejahteraan bagi para pemegang saham dengan tingkat pengembalian yang tinggi.

Berdasarkan uraian mengenai profitabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah sebuah pencapaian perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba sesuai dengan kebijakan manajemen, profitabilitas pula yang akan menjadi pertimbangan bagi para investor dalam penanaman modal. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROI atau ROA berdasarkan kepada sumber Permatasari (2019). Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \text{Laba bersih setelah pajak} / \text{Total asset}$$

2.2.4. Pendayagunaan Aset

2.2.4.1. Aset

Aset merupakan sesuatu atau sumber daya kekayaan atau modal yang kita miliki, investasi, bangun, produktifkan dan kerjakan sehingga suatu saat bermanfaat dan dapat memberikan keuntungan, serta menjadi sumber penghasilan. Menurut Fahmi (dalam Paryati, 2019) sebuah aset perusahaan dibagi menjadi dua bagian yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan aset yang periode penggunannya dalam waktu satu tahun atau kurang, dalam bentuk tunai atau untuk dijual kembali dalam bentuk uang. Sedangkan aset tidak lancar yaitu berupa aset tetap dan aset tidak berwujud. Aset tetap ialah kekayaan perusahaan yang memiliki waktu lebih dari satu periode akuntansi, jenis aset tetap tersebut memiliki nilai dalam bentuk material yang sangat tinggi, bentuk aset ini bisa berupa bangunan, tanah, alat industri dan kendaraan operasional, sedangkan aset yang tidak terwujud yaitu berupa hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai yang cukup tinggi. (Sastratmadja, 2008:130)

2.2.4.2. Manajemen Aset

Manajemen aset merupakan sebuah proses pengelolaan segala sumber daya baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, serta mampu mendorong tercapainya tujuan dari individu dan perusahaan. Melalui proses manajemen yang disingkat POAC, yaitu: *planning, organizing, actuating* dan *controlling* sehingga dapat dimanfaatkan atau dapat mengurangi biaya (*cost*) secara efisien dan efektif. (Sembiring, Rio 2019)

Melalui kegiatan operasi, segala sumber daya masukan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang akhir, barang setengah jadi, atau jasa. Bagi perusahaan yang berorientasikan laba, produk ini selanjutnya dijual untuk memperoleh keuntungan dan sumber dana yang baru bagi kegiatan operasi berikutnya. Sementara bagi perusahaan

pemerintah atau organisasi nirlaba, produk ini diberikan kepada masyarakat atau pengguna tertentu untuk memenuhi misi organisasi. Kegiatan operasi merupakan kegiatan kompleks, yang mencakup tidak saja pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan operasi, tetapi juga mencakup kegiatan teknis untuk menghasilkan suatu produk yang memenuhi spesifikasi yang diinginkan, dengan proses produksi yang efektif dan efisien serta mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen dimana mendatang.

Pembuatan barang atau jasa ini merupakan suatu transformasi dari sumber daya menjadi barang atau jasa. Semakin efisiensi transformasi itu dikerjakan maka akan semakin produktif pelaksanaan manajemen asetnya. Produktivitas juga sebagai ukuran utama yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu kegiatan operasi. Produktivitas ini merupakan ukuran bagaimana baiknya sumber daya dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Herjanto, Book Google)

Analisis mengenai manajemen aset ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu analisis keuangan rasio pendayagunaan aset. Rasio yang termasuk dalam analisis aktivitas, rasio ini akan menggambarkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan perusahaan terhadap aset yang dimiliki perusahaan itu.

Berikut beberapa rasio pendayagunaan aset :

1. Penjualan terhadap kas dan setara kas
2. Penjualan terhadap piutang
3. Penjualan terhadap persediaan
4. Penjualan terhadap modal kerja
5. Penjualan terhadap aset tetap
6. Penjualan terhadap aset lainnya, termasuk aset tidak berwujud
7. Penjualan terhadap total aset
8. Penjualan terhadap liabilitas jangka pendek

(Subramanyam, 2014)

Berdasarkan uraian tentang pendayagunaan aset diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan aset yaitu untuk menggambarkan setiap perusahaan sudah membuat manajemen penggunaan aset dengan efisien dan efektif atau belum, karena aset sendiri adalah suatu sumber daya yang dimiliki perusahaan yang jika dikelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Dalam penelitian ini dengan pembaruan menggunakan variabel pendayagunaan aset yang belum ada dari penelitian sebelumnya akan digunakan rasio pendayagunaan aset yaitu Penjualan terhadap Total Aset untuk mengetahui laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan manajemen perusahaan yang telah ditetapkan sehingga laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dapat disajikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Ratio Pendayagunaan Aset} = \text{Penjualan} / \text{Total Asset}$$

2.2.5. *Leverage*

2.2.5.1. **Pengertian *Leverage***

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang menjelaskan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal dan juga aset perusahaan. Rasio *leverage* juga menggambarkan tentang sumber dana operasi yang telah digunakan oleh perusahaan. Rasio leverage ini menunjukkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan.

Pengertian leverage menurut beberapa ahli yaitu :

1. Sartono

Leverage adalah pemanfaatan sumber dana serta aset perusahaan yang mempunyai biaya tetap. Penggunaan sumber daya dan aset itu memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi keuntungan dari para pemegang saham.

2. Irawati

Leverage adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menginvestasikan sumber dana. Hal tersebut disertai dengan adanya biaya tetap atau beban yang ditanggung oleh perusahaan.

3. Sjahrial

Leverage merupakan penggunaan sumber dana dan asset yang dimiliki perusahaan yang mempunyai biaya tetap. Sumber dana tersebut diperoleh dari pinjaman. Selain itu sumber dana pinjaman mempunyai bunga yang berfungsi menjadi beban tetap. Jadi dapat dijadikan sebagai potensi dalam meningkatkan keuntungan untuk pemilik atau pemegang saham di perusahaan tersebut.

4. Syamsuddin

Leverage adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam penggunaan aktiva atau dana. Dana atau aktiva itu harus memiliki beban tetap sehingga dapat memperbesar dan meningkatkan penghasilan bagi pemilik perusahaan.

5. Fakhrudin

Leverage yaitu jumlah hutang yang dipergunakan membeli dan membiayai semua aset perusahaan. Semakin tinggi jumlah hutang perusahaan, maka tingkat leverage perusahaan pun menjadi lebih tinggi. Jika hutang perusahaan rendah, maka tingkat leverage pun menjadi rendah.

(Ramadhan, Artikel Finata 2020)

2.2.5.2. Jenis-jenis *Leverage*

Menurut Hery (dalam Ramadhani, 2018) jenis-jenis rasio *leverage* adalah sebagai berikut :

1. Rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset.

2. Rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini

dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan.

3. Rasio utang jangka panjang terhadap modal (*Long Term Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan

Berdasarkan penjelasan diatas terkait *leverage*, maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan suatu penggunaan sumber dana atau aset yang dimiliki perusahaan dengan adanya biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Rasio *leverage* digunakan untuk menggambarkan sumber dana yang diperoleh perusahaan cenderung digunakan untuk kegiatan operasional atau investasi jangka panjang. Dalam penelitian ini rasio *leverage* yang digunakan adalah *Debt to Asset Ratio* yang berdasarkan sumber dari Sugeng, B. (2017) :

$$\text{DAR} = \text{Total Utang} / \text{Total Aset}$$

2.3.Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR

Menurut Tasya (2018) profitabilitas adalah setiap kemampuan perusahaan agar dapat menghasilkan pendapatan dari bentuk kegiatan penjualan terkait operasional ataupun dalam hal pengelolaan aset terkait masa depan bagi perusahaan, sehingga profitabilitas dapat dijadikan bentuk

tolak ukur bagi para investor maupun kreditor dalam penilaian kinerja suatu perusahaan.

Dengan pengertian bahwa profitabilitas adalah tolak ukur bagi para investor ataupun kreditor maka setiap perusahaan akan menjelaskan secara rinci tentang profitabilitas yang didapat dalam laporan tahunan mereka. Dan bagi investor muslim pun akan melihat laporan tahunan itu serta pengungkapannya dalam ISR sebagai pertimbangan profit yang dihasilkan benar sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian oleh Sabrina & Betri pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan *leverage* bersama tentang pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

2.3.2 Pengaruh pendayagunaan aset terhadap pengungkapan ISR

Pendayagunaan aset yaitu untuk menggambarkan setiap perusahaan sudah membuat manajemen penggunaan aset dengan efisien dan efektif atau belum, karena aset sendiri adalah suatu sumber daya yang dimiliki perusahaan yang jika dikelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan.

Aset yang digunakan dalam suatu perusahaan ini akan menjadi perhatian bagi para dewan komisaris dan para pemangku kepentingan, jadi untuk dapat dilihat lebih jelas perusahaan seharusnya melaporkan secara terperinci manajemen aset yang dijalankan selama perusahaan beroperasi dalam laporan tahunannya sehingga pengungkapan ini yang berpengaruh kemudian kepada ISR. Manajemen aset sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

Dari uraian pendayagunaan aset ini dapat dilihat bahwa pendayagunaan aset berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR karena dengan mengetahui rasio pendayagunaan aset tersebut maka akan terlihat bagaimana manajemen aset yang ada di suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan sudah sesuai syariat atau belum.

2.3.3 Pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan ISR

Menurut artikel Finata dalam situsnya yang ditulis Ramadhan, A. (2020) *leverage* merupakan suatu penggunaan sumber dana atau aset yang dimiliki perusahaan dengan adanya biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut.

Rasio *leverage* digunakan untuk menggambarkan sumber dana yang diperoleh perusahaan cenderung digunakan untuk kegiatan operasional atau investasi jangka panjang.

Dengan adanya pengertian *leverage* tersebut maka perusahaan harus menerangkan dalam laporan tahunan mereka bersumber darimana saja dana yang digunakan dalam operasioanal perusahaan. Pengungkapan terhadap sumber dana ini yang berpengaruh dengan ISR karena akan terlihat apakah sumber dana tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Menurut penelitian Eksandy (2017) menjelaskan bahwa *leverage* memiliki efek negatif pada pengungkapan ISR setelah dimoderasi oleh akuntabilitas dan transparansi.

2.3.4 Pengaruh akuntabilitas sebagai variabel moderating terhadap pengungkapan ISR

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban setiap perusahaan terhadap lingkungan baik di dalam maupun di luar perusahaan serta sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh IAEI.

Penelitian Eksandy (2017) menghasilkan bahwa akuntabilitas mampu memoderasi *leverage* sehingga berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR.

Akuntabilitas yang menjadi variabel moderating yaitu berdasarkan kepada poin-poin yang tercantum dalam IAEI dimana poin-poin ini yang akan memperkuat hubungan dan penjelasan yang didapat dari laporan tahunan setiap perusahaan yaitu tentang profitabilitas, pendayagunaan aset serta *leverage* sehingga dasar perincian tersebut berhubungan terhadap pengungkapan ISR

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Hipotesis juga merupakan pernyataan sementara yang berupa dugaan tentang apa saja yang sedang diamati dalam upaya memahaminya. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus dilakukan pengujian. Oleh sebab itu hipotesis memiliki fungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran. (Hendriyadi, 2019).

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang ada dalam penelitian ini yaitu :

H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR

H₂ : Pendayagunaan aset berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR

H₃ : *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan ISR

H₄ : Akuntabilitas mampu memoderasi variabel independen terhadap pengungkapan ISR

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Pengungkapan ISR dalam perusahaan harus dilakukan setiap perusahaan yang berlandaskan syariat Islam dalam operasionalnya, pengungkapan ISR ini pun bertujuan agar para investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu perusahaan dapat menilai kinerja dan tanggung jawab perusahaan yang dituju sesuai atau tidak dengan syariat Islam.

Dalam suatu kerangka pemikiran menunjukkan antara pengaruh dari variabel independen dengan variabel dependen serta adanya variabel moderasi untuk memperkuat. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas (ROA), Pendayagunaan Aset (STA), dan *Leverage* (DAR). Variabel moderasi yaitu Akuntabilitas (AKT). Variabel dependen yang ada yaitu Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Dilihat dari uraian teori dan penelitian yang terdahulu maka dapat dibuat kerangka penelitian yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

